

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Menurut Peraturan bupati Trenggalek nomor 67 tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah kabupaten Trenggalek dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati Trenggalek<sup>2</sup>, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek menetapkan kebijakan tentang sistem akuntansi pemerintahan. Dinas perhubungan Kabupaten Trenggalek Merupakan salah satu Instansi pemerintah daerah Sektor Publik yang menggunakan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kualitas hasil laporan keuangan.

Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, penggunaan teknologi informasi telah menjadi sebuah keharusan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di berbagai sektor, termasuk dalam lembaga pemerintahan seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek. Salah satu aspek penting dari penerapan teknologi informasi adalah penggunaan aplikasi manajemen keuangan daerah, yang bertujuan untuk memudahkan proses pelaporan, analisis keuangan, dan pengelolaan anggaran. Sebagai tanggapan terhadap tantangan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten

---

<sup>2</sup> Peraturan daerah kabupaten Trenggalek nomor 67 tahun 2014 tentang sistem akuntansi

Trenggalek telah mengadopsi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk manajemen keuangan daerah. Meskipun SIMDA memberikan beberapa manfaat, seperti otomatisasi dalam proses pengarsipan dan pelaporan keuangan, namun penggunaannya sering kali terkendala oleh masalah teknis, terutama terkait dengan ketersediaan dan keandalan jaringan internet. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan potensi kehilangan data akibat kesalahan atau gangguan jaringan.

Kemajuan teknologi, muncul alternatif baru dalam bentuk Financial Management Information System (FMIS), yang menjanjikan penggunaan yang lebih sederhana dan efisien dalam pengelolaan data keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbandingan antara SIMDA dan FMIS dalam konteks Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kedua aplikasi tersebut dalam manajemen keuangan daerah, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kemudahan penggunaan, keandalan penyimpanan data, dan potensi penghematan waktu dan sumber daya. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak terkait dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemilihan aplikasi manajemen keuangan daerah yang tepat dan berkelanjutan. Pada dasarnya aplikasi tersebut membantu dan memudahkan Dinas Perhubungan untuk mengatur, mengendalikan, meminimalisir kesalahan dan menjaga konsistensi dalam pemrosesan data Transaksi. Dengan adanya penggunaan aplikasi tersebut apakah Dinas Perhubungan

sudah mampu menerapkan dan menggunakan sistem informasi akuntansi dengan baik. Meskipun ada banyak manfaat penggunaan Teknologi informasi dalam FMIS, penting untuk mencatat bahwa implementasi yang sukses memerlukan investasi awal yang signifikan dalam infrastruktur Teknologi Informasi, pelatihan staff, dan perencanaan yang matang. Selain itu perhatian harus diberikan pada keamanan data dan privasi informasi keuangan pemerintah.

Penggunaan Teknologi Informasi yang tepat dalam penerapan FIMS, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pelaporan keuangan dan tingkat transparansi yang pada akhirnya dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih baik. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>3</sup>

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintahan sesuai dengan Peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 2005 yang telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010.<sup>4</sup> Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government governance*) , yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel yang memungkinkan para pemegang laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Informasi yang dikeluarkan harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai atau kualitas, informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatis yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.<sup>5</sup>

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam rangka konseptual akuntansi pemerintah Peraturan (Pemerintah nomor 71 tahun 2010) adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami titik Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

<sup>5</sup> Suwarjono. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi ketiga. (Yogyakarta: BPFE, 2005)

daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan sebuah pemerintahan tergantung pada informasi yang telah disajikan dan bagaimana pemerintahan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan pada kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan sebuah material yang dapat diandalkan sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.<sup>6</sup>

Pemilihan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek sebagai objek penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Perhubungan bertanggung jawab memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Kompleksitas operasional yang mencakup berbagai aspek transportasi memerlukan sistem informasi akuntansi yang andal. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi dan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

---

<sup>6</sup> Elmida Ihsanti, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)*.

Selain itu, penelitian ini dapat mengidentifikasi area perbaikan dan memberikan dampak praktis yang signifikan bagi Dinas Perhubungan. Kemudahan akses data dan dukungan dari Dinas Perhubungan juga memudahkan proses penelitian. Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini berjudul “ **Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Laporan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.**”

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian masalah di atas maka peneliti mengidentifikasi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Financial Management Information System di Dinas Perhubungan kabupaten Trenggalek dalam mengelola dan memproses data keuangan?
2. Bagaimana dampak penggunaan FMIS terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Finansial Management Information System di Dinas Perhubungan kabupaten Trenggalek dalam mengelola dan memproses data keuangan.
2. Untuk mengetahui dampak penggunaan FMIS terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mendeskripsikan apakah Penerapan sistem informasi akuntansi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti diharapkan mampu memberikan kegunaan yaitu diantara-Nya sebagai berikut:

##### **1. Secara Akademis**

Menurut kegunaan teoretis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan membantu mengembangkan gagasan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya terkait efisiensi pelaporan keuangan pemerintahan daerah. Diharapkan dapat juga digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian terkait.

##### **2. Secara praktis**

###### **a) Bagi Dinas Perhubungan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau sebagai dasar evaluasi pemerintahan daerah khususnya

Dinas Perhubungan kabupaten Trenggalek mengenai penggunaan teknologi informasi khususnya aplikasi finansial manajemen informasi System yang dilakukan di Dinas Perhubungan guna meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

b) Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah kepustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh seluruh kalangan akademis atau pihak yang membutuhkan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi dan juga referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa pada masa yang akan mendatang. Sehingga mampu melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

## **E. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup merupakan suatu batasan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan penelitian, sehingga tidak menyimpang dengan tujuan penelitian. Penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan sebagai variabel independen dan penerapan sistem informasi akuntansi sebagai variabel dependen.



## 2. Batasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Penelitian ini hanya meneliti tentang penerapan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kualitas hasil laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.
- b) Penelitian ini hanya dilakukan di Dinas Perhubungan kabupaten Trenggalek.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

- 1) Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi atau sekumpulan sumber daya yang dirancang untuk menyediakan data bagi para pengambil keputusan sesuai kebutuhan dan kewenangan mereka.<sup>7</sup>
- 2) Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, pelaporan.<sup>8</sup>
- 3) Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan pemerintahan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana pemerintahan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan Kerangka konseptual dan prinsip-

---

<sup>7</sup> George H. Bodnar, dkk. , *Sistem informasi akuntansi edisi 9* (Yogyakarta)

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Baik buruknya kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya pemerintah tersebut. Pemerintahan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan.<sup>9</sup>

## 2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “penerapan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan kualitas hasil laporan keuangan pada Dinas Perhubungan kabupaten Trenggalek” secara operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti Kualitas hasil laporan keuangan ke dalam penerapan sistem informasi akuntansi yang berada pada Dinas Perhubungan kabupaten Trenggalek.

## G. Sistematika Penulisan

### 1. Bagian Awal

Tersusun atas halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman abstrak.

### 2. Bagian Utama

**Bab I Pendahuluan**, yang tersusun atas Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian Kegunaan

---

<sup>9</sup> Muhammad hidayat lubis, *analisis sistem informasi akuntansi atas kualitas laporan keuangan pada kantor dinas pemuda dan olahraga provinsi Sumatera utara*. 2019

Penelitian, Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan.

**Bab II Landasan Teori**, yang tersusun atas Tinjauan Tentang Sistem Informasi Akuntansi, Tinjauan Tentang Kualitas Laporan Keuangan, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir.

**Bab III Metode Penelitian**, yang tersusun atas Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan Dan Tahap-Tahap Penelitian.

**Bab IV Hasil penelitian**, yang tersusun atas Deskripsi Data dan Temuan Penelitian

**Bab V Pembahasan**, yang tersusun atas Pembahasan yang berisi analisis hasil penelitian

**Bab VI Penutup**, yang tersusun atas Kesimpulan dan Saran.

### 3. Bagian Akhir

Tersusun atas Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Surat Pernyataan Keasrian Tulisan, Daftar Riwayat Hidup.